



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2022

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.



BUPATI GOWA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiq-Nya semua aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, termasuk dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa ini sebagai laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat, maka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan suatu kewajiban konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69, sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022 ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan revidi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program pencerahan qolbu jum'at ibadah, program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim putra putri terbaik kita untuk disekolahkan dengan dibiayai oleh pemerintah.



Akhirnya kami menyadari sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kami sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat lebih maju dan lebih berhasil.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungguminasa, Maret 2023

BUPATI GOWA,



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, dengan definisi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.



Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”.

Atas dasar tersebut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2022.

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG - UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Wilayah Kabupaten Gowa terbentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang. Kabupaten Gowa berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Letak wilayah administrasi menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap



percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2022 tercatat sebanyak 772.084 jiwa yang terdiri dari 382.173 jiwa penduduk laki-laki, dan 389.911 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 96,96 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 397 jiwa/km². Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin Raja Gowa XIV dengan gelar Ayam Jantan dari Timur bernama asli I Mallombassi Daeng Mattawang, seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar serta yang terbaru Karaeng Pattingalloang.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan **Karaeng Pattingalloang** serta ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar** membuat keduanya diangkat oleh Negara sebagai Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan.

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Staf Ahli; Sekretariat Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Inspektorat Daerah; 24 (dua puluh empat) Dinas dan 6 (enam) Badan serta ditambah dengan 18 (delapan belas) Pemerintahan Kecamatan. Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 6.990 Orang.



F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2022 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.760.456.992.472,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.780.958.403.139,69 atau sebesar 101,69 persen yang terdiri dari :

- a. **Pendapatan Asli Daerah** yang ditargetkan Rp.250.890.698.571,00 telah terealisasi sebesar Rp.265.316.455.033,69 atau 105,75 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.135.650.581.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.148.268.572.233,00 atau 109,30 persen.
 - Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.69.790.772.397,00 dengan realisasi sebesar Rp.68.570.249.968,00 atau 98,25 persen.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar 4.282.256.747,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.932.255.747,00 atau 91,83 persen.
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.41.167.087.997,00 dengan realisasi sebesar Rp.44.545.377.085,69 atau 108,21 persen.
- b. **Pendapatan Transfer** dari target sebesar Rp.1.496.976.493.901,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.503.052.148.106,00 atau 100,41 persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dari target Rp.1.387.433.722.445,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.369.674.786.928,00 atau 98,72 persen.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah, dari target Rp.109.542.771.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.377.361.178,00 atau 121,76 persen.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, dengan target sebesar Rp.12.589.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.589.800.000,00 atau 100 persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Hibah, dari target Rp.12.589.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.589.800.000,00 atau 100 persen.



2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2020 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.141.847.697.845,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.884.234.023.366,39 atau 87,97 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.346.030.112.108,74 yang terealisasi sebesar Rp. 1.225.293.555.282,99 atau 91,03 persen dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2022 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 570.664.012.650,26 dengan realisasi sebesar Rp. 434.879.302.696,40 atau 76,21 persen dari yang dianggarkan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 2.161.495.385,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.949.892.460,00 atau 90,21 persen dari yang dianggarkan.

d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 222.992.077.701,00 dengan realisasi sebesar Rp. 222.111.272.927,00 atau 99,61 persen dari yang dianggarkan.

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu aturan - aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

- 1) Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan", diterapkan:

Strategi 1 : Meningkatkan akses, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau dan berkarakter, meningkatkan



kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.

- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat“, diterapkan:
Strategi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah“, diterapkan:
Strategi 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

MISI 2: Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah“, diterapkan:
Strategi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah“, diterapkan:
Strategi 5 : Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
- 6) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil, diterapkan:
Strategi 6 : Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
- 7) Untuk mencapai sasaran “Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat“, diterapkan:
Strategi 7 : Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dengan menjalin kemitraan antara



pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

- 8) Untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi”, diterapkan:

Strategi 8 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya.

- 9) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan”, diterapkan:

Strategi 9 : Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa dan pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri.

- 10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, diterapkan:

Strategi 10 : Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

MISI 4: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

- 11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, diterapkan:

Strategi 11 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

- 12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”, diterapkan:

Strategi 12 : Meningkatkan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi dan komunikasi.



B. VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan ***“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan terakhir periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode pertama ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2021-2026.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu ***“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”*** dan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu ***“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”***, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisialisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang dapat diperoleh di masa yang depan. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.



C. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gowa di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menetapkan tema pembangunan yaitu **“Memacu Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Pembentukan Rumah Produktif untuk Menangani Dampak Covid-19 dan Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan”**. Selanjutnya mengacu pada visi dan misi serta tema pembangunan tersebut ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan;
3. Penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Program prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2022, antara lain:

- 1). Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat;
- 2). Belum optimalnya perekonomian daerah dan masyarakat;
- 3). Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;

Tabel 1.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA		SKPD	KET	
				INDIKATOR	TARGET			
1.	Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan	1. Pendidikan Gratis	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD : 100% SMP : 96,85%	Dinas Pendidikan		
			2. Investasi SDM Seperempat Abad	Jumlah siswa yang mengikuti program Investasi SDM Seperempat Abad	1483 Orang			
			1. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan	Angka Kelulusan	SD : 100% SMP : 100%			
		Peningkatan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga pendidik	2. Imtaq Indonesia (Pengganti Calistung Kelas 1 dan 2)	Persentase sekolah yang menerapkan Imtaq Indonesia	100% (412 SD)			
			3. Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%			
			Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga, peningkatan dan pembangunan sarana dan	1. Kesehatan Gratis	Cakupan pelayanan		100 %	Dinas Kesehatan
		2. Program penunjang lainnya		Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%		SKPD Penanggung Jawab	
		3. Peningkatan Puskesmas Non		Persentase puskesmas	17%		Dinas Kesehatan	



	prasarana pelayanan kesehatan		Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan	perawatan			
		4.	Peningkatan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (Akreditasi Puskesmas)	Persentase puskesmas terakreditasi	25 Puskesmas Terakreditasi	Dinas Kesehatan	
		5.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD Penanggung Jawab	
	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai - nilai keagamaan	1.	Pencerahan Qalbu Jum'at Ibadah	Rata - rata partisipasi masyarakat dan aparatur dalam mengikuti pencerahan qalbu jum'at ibadah	3945 Orang	Dinas Sosial	
		2.	Pemberian insentif bagi guru mengaji	Jumlah guru mengaji dan Pembina TK/TPA yang mendapatkan insentif	628 Orang	Dinas Sosial	
		3.	Pemberian insentif bagi imam dusun/ lingkungan	Cakupan imam dusun/ lingkungan yang mendapatkan insentif	1385 Orang	Dinas Sosial	
	Peningkatan kemandirian para fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS	1.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	90%	Dinas Sosial	
		2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD Penanggung Jawab	
	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1.	Pengembangan UMKM Unggulan	Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	167 UMKM Unggulan	Dinas Koperasi dan UMKM	
		2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
	Pengarus-utamaan gender	1.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam vocal point	48 SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan anak dasar anak	1.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Jumlah sarana dan prasarana pada lembaga perlindungan perempuan dan anak	1 Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
	Penyadaran KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi	1.	Program keluarga berencana	Persentase peserta KB aktif MKJP	11%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	



		Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan fasilitasi cabang olahraga	1.	Pemberdayaan pemuda	Jumlah kegiatan pemuda	74 Kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			2.	Pembinaan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	31,03%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan sanitasi	1.	Program lingkungan sehat	Persentase rumah tangga bersanitasi	75,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2.	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan	Rasio rumah layak huni	73,32%	Dinas Perkimtan dan Dinas Sosial	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
2.	Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan	1.	Proram pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya prasarana jalan dan jembatan	2127 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Terpeliharanya tingkat keandalan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	150 Km		
			2.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Angka kecelakaan lalu lintas	149 kejadian	Dinas Perhubungan	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan	1.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya	Rasio jaringan irigasi	90,16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2.	Program peningkatan sarana dan prasarana produksi (bantuan bibit dan pupuk)	Produksi dan produktivitas padi dan palawija	Padi : 405.616 ton Jagung : 253.101 ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Produktivitas hortikultura	Kentang : 21,20 ton/ha Cabe : 6,6 ton/ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Areal tanaman kakao dan kopi	Kakao : 1.850 ton Kopi : 2.650 ton	Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	1.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jenis dokumen per tahun	8 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	



			2.	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi AFP Opini BPK	75% WTP	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan wisata alam dan wisata budaya	1.	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan	5 objek daerah tujuan wisata (OTDW)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			2.	Pemeliharaan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	93 buah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	1.	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	27,11	Dinas PUPR &DLH	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan kawasan strategis secara terpadu	1.	Optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis	Persentase kawasan yang dikelola	46,15	Dinas PUPR	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
3.	Penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah	Peningkatan ketersediaan pangan	1.	Ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama (ton)	168.886	Dinas Ketahanan Pangan	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	1.	Program peningkatan kesempatan kerja	Angka pengangguran terbuka (%)	3,22 Km	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan wisata alam dan wisata budaya	1.	Peningkatan pemasaran wisata (penyelenggaraan Kota Raya Malino)	Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	127.092 Orang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	



		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1.	Pengembangan UMKM Unggulan	Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	167 UMKM Unggulan	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Memantapkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat	1.	Fasilitasi Pengembangan UMKM Unggulan	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	20,96%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan peluang investasi	1.	Peningkatan perluasan informasi barang dan jasa serta peluang investasi daerah yang dapat dikembangkan	Nilai investasi (Rp)	796.496,94	Dinas PM & PTSP	
			2.	Peningkatan kualitas perdagangan berbasis pasar rakyat	Laju inflasi	4,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa	1.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang	18,01%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
4.	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengembangan SDM Aparatur dan pembinaan karier yang lebih efektif	1.	Peningkatan kapasitas birokrasi	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat	40%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			2.	Pengembangan SDM Aparatur, Pembinaan karier berbasis kompetensi	Proporsi PNS dengan standar kompetensi pegawai (SKP) pada kategori baik (%)	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	1.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jenis dokumen per tahun	8 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			2.	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi AFP	75%	Inspektorat Daerah	
					Opini BPK	WTP	Inspektorat Daerah	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	



		Penanganan pengaduan masyarakat	1.	Kualitas pelayanan publik	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	71,43	Dinas PM & PTSP Disdukcapil Bapenda Unit Layanan Publik Lainnya	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas	827	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			2.	Peningkatan pembinaan partai politik dan organisasi politik	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	72% (Pemilukada Kabupaten)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			3.	Program peningkatan, pencegahan dan kesiagapan menghadapi bencana	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen bencana (menit)	<60	Dinas Pemdam Kebakaran dan BPBD	
			4.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Penguatan dukungan sarana dan prasarana	1.	Peningkatan pengawasan dan pemantauan status baku mutu air	Tingkat pencemaran lingkungan (baku mutu)	<baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup	
			2.	Pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan	Pengakuan huum lingkungan (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase penanganan sampah (%)	59,66	Dinas Lingkungan Hidup	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Pembinaan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	Bappeda	
					Penjabaran program RKPD ke dalam APBD (%)	100	Bappeda	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	

Sumber : RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2022.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat, Urusan Pemerintahan yang dibagi



antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas (2) dua jenis urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal ini disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Cakupan pelayanan dasar sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Pengaturan standar pelayanan dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara



secara minimal dan harus mampu dicapai oleh setiap daerah sesuai dengan batas waktu capaian yang ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Di Kabupaten Gowa SKPD pelaksana SPM adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial.

B. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut :

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Undang - undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri koordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian maupun instansi pemerintah lain termasuk lembaga nonstruktural.

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Otonomi Daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi rujukan pelaksanaan SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar.

4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Petunjuk teknis terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal meliputi format laporan penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah serta target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

RPJPD Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.



- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.

8. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Penetapan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2021-2026.

10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan, dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun 2022.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa yang diturunkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022. Selain itu, juga disusun berdasarkan hasil



evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022, serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 dapat semakin mengarah pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa serta pada pencapaian Visi Kabupaten Gowa yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbaik.

Kebijakan umum daerah Kabupaten Gowa dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal telah dituangkan dalam RPJMD yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum di bidang pendidikan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi,
2. Kebijakan umum di bidang kesehatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.
3. Kebijakan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu peningkatan penataan infrastruktur perkotaan yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.
4. Kebijakan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal masyarakat, pembinaan mental spiritual masyarakat serta penyebaran informasi produk-produk hukum kepada masyarakat.
5. Kebijakan umum di bidang sosial yaitu pemberian bantuan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Gowa

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.29	70.99	0.70%
2	Angka Kemiskinan	7.54%	7.36%	-0.18%
3	Angka Pengangguran	4.30%	3.26%	-1.04%
4	Pertumbuhan Ekonomi	Rp 14.025.760.000,00	Rp 15.043.700.000,00	7.26%
5	Pendapatan Perkapita	Rp 30.440.000,00	Rp 32.700.000,00	7.42%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.345	0.358	0.013%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gowa, 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa berada di angka 70.99 naik 0.70 persen dibandingkan pada tahun 2021 yang berada di angka 70.29. Hasil ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil sama juga ditunjukkan pada angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2022 angka kemiskinan berada pada posisi 7.36%, mengalami penurunan sebesar 0.18 % dari tahun 2021 yang berada pada posisi 7.54%. Angka Pengangguran di Kabupaten Gowa pada tahun 2022 adalah 3.26% turun 1.04% dari tahun 2021 yang berada pada 4.30%. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 berada pada 7.26% naik 312.5% dari tahun 2021 yang berada pada 1.76%. Badan Pusat Statistik mencatat besaran pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sebesar Rp 30.440.000,00 sedangkan untuk tahun 2022 naik 7.42% menjadi sebesar Rp 32.700.000,00 dan ketimpangan pendapatan atau dikenal dengan *gini ratio* Kabupaten Gowa berada pada posisi 0.345 pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 berada pada posisi 0.358.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

**2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN**

Adapun capaian indikator kinerja kunci keluaran dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
1		Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	435 Lembaga	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14.589 Org	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.589 Org	Dinas Pendidikan	
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	942 Org	Dinas Pendidikan	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	942 Org	Dinas Pendidikan	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	594 Org	Dinas Pendidikan	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	317 Org	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
1		Jumlah SD Negeri terakreditasi	416	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	74.431 Org	Dinas Pendidikan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.332 Org	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.372 Org	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	938 Org	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	938 Org	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.023 Org	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	361 Org	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	494 Org	Dinas Pendidikan	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah				
1	Jumlah SMP Negeri terakreditasi	115	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	28.099 Org	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	28.099 Org	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.974 Org	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.974 Org	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.974 Org	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	434 Org	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.859 Org	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	76 Org	Dinas Pendidikan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	164 Org	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	16	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.464 Org	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.464 Org	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	404 Org	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	395 Org	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	390 Org	Dinas Pendidikan	
		9	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak Perlu Diisi		
		10	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tidak Perlu Diisi		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	738 Org	Dinas Kesehatan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	492 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	485 Org	Dinas Kesehatan	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3.439 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	5.047 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	165 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	557 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	204 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	223 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	147 Org	Dinas Kesehatan	



3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	35.17%	Dinas PUPR	
	2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	31.02%	Dinas PUPR	
	3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0%	Dinas PUPR	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
	2	Tersusunnya dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	3	Jumlah BUMD dan UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	PDAM Tirta Je'neberang	Dinas PUPR	
	4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 (Satu) Izin	Dinas PUPR	
	5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	574 KK	Dinas PUPR	
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak ada Pembangunan	Dinas PUPR	
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	574 RT	Dinas PUPR	
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.779 RT	Dinas PUPR	
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	90.7%	Dinas PUPR	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	90.1%	Dinas PUPR	
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	4.8%	Dinas PUPR	
	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	3 Kendaraan/ 2 IPLT	Dinas PUPR	
	12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	15.163%	Dinas PUPR	
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Belum Ada Jasa Penyedotan	Dinas PUPR	
	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota				
	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0.005%	Dinas PUPR	
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	34 IMB	Dinas PUPR	
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda No. 4 Tahun 2014	Dinas PUPR	
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Belum Ada	Dinas PUPR	
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	105 Unit	Dinas PUPR	
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara dan dirawat	8 Unit	Dinas PUPR	
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota				



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	92%	Dinas PUPR		
		2	Panjang jalan yang dibangun	192.24 km	Dinas PUPR		
		3	Panjang jembatan yang dibangun	133 m	Dinas PUPR		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	24.83 km	Dinas PUPR		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	133 m	Dinas PUPR		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	21.42 km	Dinas PUPR		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 m	Dinas PUPR		
		8	Panjang jalan yang dipelihara	21.42 km	Dinas PUPR		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	57.5 m	Dinas PUPR		
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1 Kegiatan	Dinas PUPR		
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	98 Orang	Dinas PUPR		
		3	Jumlah tenaga konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	98 Orang	Dinas PUPR		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Dinas PUPR		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dinas PUPR		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas PUPR	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Dinas PUPR	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas PUPR	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUPR	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR		
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Kecelakaan	Dinas PUPR		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		8	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		9	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	2 Ha	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0 Unit	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2 Ha	Dinas Perkimtan		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kabupaten/kota	162.587 Unit	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0 Unit	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.392 Unit	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Unit	Dinas Perkimtan		
		5	Rasio rumah dan KK	1.39	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	450 Unit	Dinas Perkimtan		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	226 Unit	Dinas Perkimtan		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	162.587 Unit	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	162.587 Unit	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	162.587 Unit	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	28 Unit	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	45 Pengembang	Dinas Perkimtan		
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	45 Pengembang	Dinas Perkimtan		
		9	Jumlah pengembang yang mendapatkan penyuluhan atau pelatihan	15 Pengembang	Dinas Perkimtan		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	233 Kasus	Satpol PP		
		2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	29 Org	Satpol PP		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	Satpol PP		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Org	Satpol PP		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada, 2 SOP	Satpol PP		
		6	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	512 Buah	Satpol PP		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana							



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1.4%	BPBD	
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	4.25%	BPBD	
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0.59%	BPBD	
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0.59%	BPBD	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	50%	BPBD	
	3	Persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana	25%	BPBD	
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten/kota	2 Jenis	Dinas Damkar	
	2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada di 2 Kecamatan	Dinas Damkar	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana/prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	Dinas Damkar		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	5 Jenis	Dinas Damkar		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	35 Orang	Dinas Damkar		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	60 Orang	Dinas Damkar		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Damkar		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	9.672 Orang	Dinas Sosial		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim (TAGANA)	Dinas Sosial		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	9.672 Orang	Dinas Sosial		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang berakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial		
		6	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	9.671 Orang	Dinas Sosial		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinas Sosial		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	9.671 Orang	Dinas Sosial		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Tidak Ada Data	Dinas Sosial	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak Ada	Dinas Sosial	
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 Unit	Dinas Sosial	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada Data	Dinas Sosial	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada Data	Dinas Sosial	
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	7 Orang	Dinas Sosial	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Sosial	
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Sosial	
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	38 Orang	Dinas Sosial	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	7 Orang	Dinas Sosial	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2 Orang	Dinas Sosial	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	5 Orang	Dinas Sosial	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	3 Orang	Dinas Sosial	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	872 Orang	Dinas Sosial	
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	872 Orang	Dinas Sosial	
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	872 Orang	Dinas Sosial		
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	872 Orang	Dinas Sosial		
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	7 Orang	Dinas Sosial		
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten		Ada	Dinas Nakertrans	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		0%	Dinas Nakertrans	
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Belum Ada	Dinas Nakertrans	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		100%	Dinas Nakertrans	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		52.17%	Dinas Nakertrans	
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		22.62%	Dinas Nakertrans	
		4	Persentase LPK yang terakreditasi		18.18%	Dinas Nakertrans	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan		100%	Dinas Nakertrans	
		6	Jumlah penganggur yang dilatih		305 Orang	Dinas Nakertrans	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		97.37%	Dinas Nakertrans	
		8	Persentase penyerapan lulusan		78.68%	Dinas Nakertrans	
9	Lulusan bersertifikat kompetensi		67.34%	Dinas Nakertrans			



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 Orang	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 Orang	Dinas Nakertrans	
Tingkat produktivitas tenaga kerja				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	18.51%	Dinas Nakertrans	
2	Data tingkat produktivitas total		Dinas Nakertrans	
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	6.45%	Dinas Nakertrans	
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	66.66%	Dinas Nakertrans	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	3 Buah	Dinas Nakertrans	
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Nakertrans	
5	Persentase perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas Nakertrans	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	3.7%	Dinas Nakertrans	
7	Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Nakertrans	
8	Jumlah penutupan perusahaan	1 Unit	Dinas Nakertrans	
9	Jumlah perselisihan kepentingan	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah perselisihan PHK	2 Kasus	Dinas Nakertrans	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	8 Orang	Dinas Nakertrans	
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2 Kasus	Dinas Nakertrans	
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0 LKS	Dinas Nakertrans	
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	25%	Dinas Nakertrans	
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	65 Buah	Dinas Nakertrans	
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	2.304 Orang	Dinas Nakertrans	
3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	8 Unit	Dinas Nakertrans	
4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0 Orang	Dinas Nakertrans	
5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	4 Orang	Dinas Nakertrans	
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	3 Unit	Dinas Nakertrans	
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	6 Kerjasama	Dinas Nakertrans	
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	287 Orang	Dinas Nakertrans	
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0%	Dinas Nakertrans	
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0 Orang	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0%	Dinas Nakertrans	
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0%	Dinas Nakertrans	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0%	Dinas Nakertrans		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 LTSA	Dinas Nakertrans		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		54 Lembaga	DP3A	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		2 Program	DP3A	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		0 Media	DP3A	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		2 Lembaga	DP3A	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	DP3A	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan		1 Lembaga	DP3A	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)		0 Lembaga	DP3A	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		Tidak Ada	DP3A	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		2 Orang	DP3A	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan		7 Lembaga	DP3A	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		2 Lembaga	DP3A	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1 Program	DP3A	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	3 Lembaga	DP3A		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DP3A		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketapang		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ya	Dinas Ketapang		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ya	Dinas Ketapang		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ya	Dinas Ketapang		
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketapang		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ya	Dinas Ketapang		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ya	Dinas Ketapang		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ya	Dinas Ketapang		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		2	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subjek	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		4	Dokumen izin membuka tanah	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
			Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal			
			Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			
			Tersedianya tanah untuk masyarakat			
			Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
11	Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota			
		1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks kualitas udara (IKU) b. Indeks kualitas tutupan lahan (ITLH) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	52.73 86.80 43.50 0	DLH	
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota			
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada Ada Tidak Ada	DLH	
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DLH	
		2	Rasio pejabat pengawas LH (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0.31%	DLH	
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0%	DLH	
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	DLH	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	DLH		
		6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik					
		1	Penerbitan akta perkawinan		36.29%	Dinas Dukcapil	
		2	Penerbitan akta perceraian		46.29%	Dinas Dukcapil	
		3	Penerbitan akta kematian		100%	Dinas Dukcapil	
		4	Penyajian data kependudukan		100%	Dinas Dukcapil	
		Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
		Kepemilikan akta kelahiran					
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Tidak Ada	Dinas PMPD	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Tidak Ada	Dinas PMPD	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Tidak Ada	Dinas PMPD	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Tidak Ada	Dinas PMPD	
Persentase peningkatan status desa mandiri							



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	121 Desa	Dinas PMPD		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	121 Desa	Dinas PMPD		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	7.042 Lembaga	Dinas PMPD		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	Dinas PMPD		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Total Fertility Rate)/Angka Kelahiran Total					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada	Dinas PP&KB	
		2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		21	Dinas PP&KB	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		28.70	Dinas PP&KB	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)		Tidak Ada Data	Dinas PP&KB	
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		28 Jenis	Dinas PP&KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		31%	Dinas PP&KB	
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		21.2%	Dinas PP&KB	
		3	Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Tidak Ada Data	Dinas PP&KB	
		4	Persentase pelayanan KB pasca melahirkan		48.2%	Dinas PP&KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		19.44%	Dinas PP&KB	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	61.29%	Dinas PP&KB		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		100%	Dinas Perhubungan	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala		488.8%	Dinas Perhubungan	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		Tidak Ada	Dinas Perhubungan	
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas		97.8%	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di jalan kabupaten/kota					
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		97.8%	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	Dinas Kominfo SP	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Video Conferences, Daftar IP Phone, Mail OPD	Dinas Kominfo SP	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal atau situs web yang sesuai standar		23.80%	Dinas Kominfo SP	
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100%	Dinas Kominfo SP			



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Koinfo SP		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang memanfaatkan sertifikat elektronik	14.81%	Dinas Koinfo SP		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40.74%	Dinas Koinfo SP		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	25.92%	Dinas Koinfo SP		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Koinfo SP		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Koinfo SP		
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Koinfo)	100%	Dinas Koinfo SP		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP		
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Dinas Koinfo SP		
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Koinfo	2%	Dinas Koinfo SP		
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Koinfo SP		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP		
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP		
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.083%	Dinas Kop&UKM		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Kop&UKM	
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.148%	Dinas Kop&UKM	
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.583%	Dinas Kop&UKM	
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.567%	Dinas Kop&UKM	
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00119%	Dinas Kop&UKM	
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00709%	Dinas Kop&UKM	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak Ada	Dinas Kop&UKM	
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.368%	Dinas Kop&UKM	
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Kop&UKM	
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Kop&UKM	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Kop&UKM	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Kop&UKM	
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.0383%	Dinas Kop&UKM	
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (OSD)	0.029%	Dinas Kop&UKM	
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.0016%	Dinas Kop&UKM	
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.0004%	Dinas Kop&UKM	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.0007%	Dinas Kop&UKM		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.0033%	Dinas Kop&UKM		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.0012%	Dinas Kop&UKM		
18 Penanaman Modal							
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		2	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan	DPM-PTSP		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	DPM-PTSP		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Ada	DPM-PTSP		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	5.489 Izin	DPM-PTSP		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp 5.420.778.835.062	DPM-PTSP		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	233 Pelaku Usaha	DPM-PTSP		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	106 Pelaku Usaha	DPM-PTSP		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	Ada	DPM-PTSP		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tidak Ada	Dispota	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Dispota	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	526 Orang	Dispota	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2 Orang	Dispota	
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan - satuan pendidikan	22 Orang	Dispota	
		2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	1 Kali	Dispota	
20	Statistik	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo SP	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2 Kali	Dinas Kominfo SP	
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 Kali	Dinas Kominfo SP	
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	



		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0 Kegiatan	Dinas Kominfo SP	
		2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	Dinas Kominfo SP	
		3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Belum Ada	Dinas Kominfo SP	
		4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	Dinas Kominfo SP	
22	Kebudayaan	Terlestarinya Cagar Budaya			
		1 Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	10 Objek	Dinas Parbud	
		2 Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1 Objek	Dinas Parbud	
		3 Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1 Objek	Dinas Parbud	
		4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	3 Orang	Dinas Parbud	
		5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengkasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Belum Ada	Dinas Parbud	
		6 Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1 Objek	Dinas Parbud	
		7 Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	
		8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	
		9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	465 Koleksi	Dinas Parbud	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	43.285 Kunjungan	Dinas Parbud	
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1 Tim TACB	Dinas Parbud	
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Ada	Dinas Parbud	
		15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	Ada	Dinas Parbud	
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	12 Orang	Dinas Parbud	
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	12 Orang	Dinas Parbud	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	119 Unit	Dinas Parbud	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5 Kegiatan	Dinas Parbud	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2.0025	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0.0041	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.0093	Dinas Perpus&Arsip	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.9451	Dinas Perpus&Arsip	
		5	Jumlah pasyarakat gemar membaca di masyarakat	0.2912	Dinas Perpus&Arsip	



		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang saha dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpus&Arsip	
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	Dinas Perpus&Arsip	
		Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Ada SOP	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai dengan NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai dengan NSPK di provinsi	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.	
1	2	3	4	5	6	
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)				
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	898 RTP	Dinas Perikanan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Perikanan	
		3	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	30 IUP	Dinas Perikanan	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	250 RTP	Dinas Perikanan	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	594.700 Ekor	Dinas Perikanan	
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	125 Objek Wisata	Dinas Parbud	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	4 Jenis	Dinas Parbud	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	79 Usaha	Dinas Parbud	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	254 Orang	Dinas Parbud	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 Kali	Dinas Parbud	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Parbud	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Parbud	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	2.008 Orang	Dinas Parbud		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	25%	Dinas Parbud		
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	14 Desa	Dinas Parbud		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota					
		Tingkat hunian akomodasi					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
		1	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	11 Jenis 27 Unit	Dinas TPH		
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	11 Unit	Dinas TPH		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Ada	Dinas TPH		
		4	Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas TPH		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas TPH		
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	46.08%	Dinas Nakbun		
4	Kehutanan						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak perlu diisi	BUP		
		3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP		
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP		
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota					
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	Tidak perlu diisi	BUP		
6	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTMT/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Tidak Ada 100%	Dinas Perdastrri		
		2	Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Perdastrri		
		3	Persentase gudang yang tidak memiliki TDG	75.22%	Dinas Perdastrri		
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	100% 100% 100%	Dinas Perdastrri		
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perdastrri		
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Tidak Ada	Dinas Perdastrri		
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	48%	Dinas Perdastrri		
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.75	Dinas Perdastrri		
		Persentase kinerja realisasi pupuk					



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	14.05 %	Dinas Perdastris		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	83.69%	Dinas Perdastris		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IKUI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
		1	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	18.75%	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	Ada	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota					
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	Ada	Dinas Perdastris		



8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	2 Unit	Dinas Nakertrans	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2 Unit	Dinas Nakertrans	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 Unit	Dinas Nakertrans	

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kunci Hasil Tahun 2022

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN WAJIB							
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Gowa}} \times 100 \%$	$\frac{21.891}{28.693} \times 100\%$	76.29 %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 thn pada Kabupaten Gowa}} \times 100 \%$	$\frac{91.446}{88.112} \times 100\%$	103.78 %	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 thn pada Kabupaten Gowa}} \times 100 \%$	$\frac{41.137}{43.900} \times 100\%$	93.71 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten Gowa	$\frac{129.811}{159.865} \times 100\%$	81.20 %	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa	$\frac{467}{787.917} \times 100\%$	0.06 %	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Gowa yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten Gowa	$\frac{2}{3} \times 100\%$	66.66 %	
		3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten Gowa	$\frac{12.456}{13.264} \times 100\%$	93.91 %	
		4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Gowa	$\frac{12.386}{12.843} \times 100\%$	96.44 %	
		5	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Gowa	$\frac{11.767}{12.337} \times 100\%$	95.38 %	
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten Gowa	$\frac{48.540}{52.362} \times 100\%$	92.70 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Gowa	$\frac{57.845}{66.222} \times 100\%$	87.35 %	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Gowa	$\frac{241.630}{322.610} \times 100\%$	74.89 %	
		9	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Gowa	$\frac{48.776}{60.412} \times 100\%$	80.73 %	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Gowa	$\frac{62.243}{86.942} \times 100\%$	71.59 %	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten Gowa	$\frac{8.249}{8.407} \times 100\%$	98.12 %	
		12	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Gowa	$\frac{1.272}{1.488} \times 100\%$	85.48 %	
		13	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten Gowa	$\frac{11.187}{14.622} \times 100\%$	76.51 %	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Gowa	$\frac{13.267}{15.931} \times 100\%$	83.27 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai Rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	$\frac{129.57}{27.806} \times 100\%$	0.46 %	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten ----- x 100% Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten t	$\frac{190.495}{230.892} \times 100\%$	82.50 %	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten/kota	$\frac{562}{230.892} \times 100\%$	0.24 %	
		6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	$\frac{37}{37} \times 100\%$	100%	
		7	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap ----- x 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	$\frac{2.106,14}{2.289,29} \times 100\%$	92 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten	$\frac{88}{88} \times 100\%$	100 %	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{222} \times 100\%$	0 %	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	$\frac{38}{40} \times 100\%$	95.00 %	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	$\frac{14}{14} \times 100\%$	100 %	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100 %	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten	$\frac{6.392}{162.587} \times 100\%$	3.93 %	
		5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten	$\frac{226}{162.587} \times 100\%$	0.15 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	$\frac{233}{233} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	$\frac{4}{15} \times 100\%$	26.67 %	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{738.320}{783.167} \times 100\%$	94.27 %	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{726.345}{783.167} \times 100\%$	92.74 %	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{1.788}{1.788} \times 100\%$	100 %	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	$\frac{29}{57} \times 100\%$	50.87 %	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14.27 Menit	14.27 Menit	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6	Sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{9.671}{9.672} \times 100\%$	99.99 %	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	$\frac{872}{872} \times 100\%$	100 %	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{200}{390.040} \times 100\%$	0.05 %	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{15.043.700.000,-}{390.040} \times 100\%$	3.856 %	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100 % Jumlah perusahaan	$\frac{21}{108} \times 100\%$	19.44 %	
		5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	$\frac{287}{2.304} \times 100\%$	12.45 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100 \%$	$\frac{\text{Rp.408.048.771,-}}{\text{Rp.1.830.665.295}} \times 100\%$	49.12 %	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100 \%$	$\frac{22}{233.289} \times 100\%$	0.009 %	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{26}{397.857} \times 100\%$	0.0065 %	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100 \%$	$\frac{567.597}{11.504} \times 100\%$	49.34 %	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100 \%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$	$\frac{8}{23} \times 100\%$	34.78 %	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100 \%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas Tanah Objek Landreform (TOL)}}{\text{Jumlah penerima tanah objek landreform}} \times 100 \%$	$\frac{934.2476}{2.249} \times 100\%$	41.54 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100 % Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	64.51	64.51	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100 % Total volume timbunan sampah kabupaten	$\frac{125.560}{143.794,85} \times 100\%$	87.32 %	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100 % Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{4}{34} \times 100\%$	11.76 %	
12	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas	$\frac{555.956}{569.833} \times 100\%$	97.56 %	
		2	Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA ----- x 1000 Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	$\frac{57.977}{233.289} \times 100\%$	24.99 %	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte lahir ----- x 100 % Jumlah anak usia 0 -18 tahun	$\frac{231.990}{233.289} \times 100\%$	99.44 %	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama penjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100 % Jumlah OPD	$\frac{9}{9} \times 100\%$	100 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	$\frac{0}{1} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	$\frac{34}{23} \times 100\%$	147.82 %	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.44	2.44	
		2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{69.818}{112.420} \times 100\%$	62.10 %	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{21.857}{112.420} \times 100\%$	19.44 %	
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		Rasio Konektivitas Kabupaten Gowa : RK = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan SDP) = (((3 x 1)/9)) x 100) + 0 = 0.33	0.33	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		V/C Ratio untuk Jalan Kabupaten Gowa : 0.26 (Tingkat Pelayanan B)	0.26 (Tingkat Pelayanan B)	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100 % Jumlah PD	$\frac{48}{54} \times 100\%$	88.89 %	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100 % Jumlah layanan publik	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100 % Jumlah penduduk	$\frac{554.238}{768.868} \times 100\%$	72.08 %	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- Jumlah seluruh koperasi	$\frac{53}{141} \times 100\%$	37.59 %	
		2	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- Jumlah usaha mikro keseluruhan	$\frac{3.347}{53.931} \times 100\%$	6.20 %	
18	Penanaman Modal	1	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ----- Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	$\frac{5.420.778.835.062-8.008.088.688.594}{8.008.088.688.594} \times 100\%$	-32 %	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ----- Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	$\frac{1.443}{192.981} \times 100\%$	0.75 %	
		2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten ----- Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	$\frac{1.488}{192.981} \times 100\%$	0.77 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Porprov : 3 Emas 18 Perak 21 Perunggu	3 Emas, 18 Perak, 21 Perunggu	
20	Statistik	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah x 100 % Jumlah PD	$\frac{54}{54} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah x 100 % Jumlah PD	$\frac{54}{54} \times 100\%$	100 %	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100 % Jumlah area penilaian	$\frac{144}{645}$	1.09	
22	Kebudayaan	1	Terlestariannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata	$\frac{9}{52} \times 100\%$	17.30 %	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		67.59	67.59	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		66.73	66.73	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	$T = (a + l + s + j) / 4$	$T = (100 + 100 + 100 + 100) / 4$ $T = 400/4$ $T = 100$	100	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + j) / 6$	$T = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6$ $T = 600/6$ $T = 100$	100	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

URUSAN PILIHAN							
1	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	2.295,5 ton	2.295,5 ton	
2	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{254 - 225}{225} \times 100\%$	12.88 %	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{754.767 - 230.281}{230.281} \times 100\%$	227.76 %	
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{51.360}{248.565} \times 100\%$	20.66 %	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{500.490.000}{23.536.840.000} \times 100\%$	2.13 %	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PAD}} \times 100\%$	$\frac{500.490.000}{265.316.455.033,69} \times 100\%$	0.19 %	
3	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}}$	$\frac{994.466,70}{130.802,12}$	7.60 ton/ha	
		2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit menular tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{2.141 - 1.733}{1.733} \times 100\%$	23.54 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4	Kehutanan						
5	Energi Sumber Daya Mineral						
6	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	$\frac{7.424}{9.143} \times 100\%$	81.19 %	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	$\frac{40.757.530}{290.047.007} \times 100\%$	14.05 %	
		3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	$\frac{5.283}{6.312} \times 100\%$	83.70 %	
7	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	$\frac{1.290 - 1.258}{1.258} \times 100\%$	2.54 %	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Belum dilaksanakan	Tidak Ada	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{143}{460} \times 100\%$	31.08 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/Tidak	Ada	Ada	
8	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kunci Hasil Tahun 2022

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							

Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100% Jumlah APBD	$\frac{\text{Rp. 199.914.657.783,00}}{\text{Rp. 2.224.019.879.780,36}} \times 100\%$	8.99 %		
--------------------------	---	---	---	--	--------	--	--



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 265.316.455.033,69}}{\text{Rp. 22.410.710.000}} \times 100\%$	1183.88 %	
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	Belanja Urusan Pemerintahan Rp. 1.139.098.476.325,00 Transfer expenditures Rp. 310.256.244.344,99 - Rp. 828.842.231.980,00 Total Belanja APBD Rp. 1.884.234.023.366,39 $\frac{\text{Rp. 828.842.231.980,00}}{\text{Rp. 1.884.234.023.366,39}} \times 100\%$	43.98 %	
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini 10 tahun terakhir	2011 - 2019 : WTP 2020 : WDP 2021 : WTP	9 WTP 1 WDP (2020)	
Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	TDI
	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{1.706}{1.410} \times 100\%$	120.99%	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100% Total belanja langsung	$\frac{\text{Rp. 1.009.534.008.103}}{\text{Rp. 1.011.162.000.000}} \times 100\%$	99.84 %	
Kepegawaian	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	$\frac{1.612}{472} \times 100\%$	341.52 %	
	2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga Kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{433}{2.084} \times 100\%$	20.77 %	
	3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{111}{433} \times 100\%$	25.64 %	
Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ----- x 100% Total belanja APBD dikurangi satu	$\frac{\text{Rp. 1.804.781.925.587,04}}{\text{Rp. 2.224.019.879.780,39}} \times 100\%$	81.15 %	
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- x 100% Total PAD dalam APBD dikurangi satu	$\frac{\text{Rp. 260.851.565.760,48}}{\text{Rp. 236.598.766.548,36}} \times 100\%$	110.25 %	
	3	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ya	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ya	
	4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA ----- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	$\frac{\text{Rp. 215.726.977.462,47}}{\text{Rp. 1.987.739.942.507,36}} \times 100\%$	10.85 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp. 83.304.000,- x 100% Rp. 82.512.000,-	100.96 %	
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100 %	



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau faktor kegagalan sehingga target tercapai atau tidak tercapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk membangun akuntabilitas adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian dan evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor 281/IV/2020 tanggal 20 April 2020 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/Penjelasan/Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Rata rata lama sekolah (RLS)	Tahun	Jumlah tahun bersekolah individu diatas 15 tahun dibagi jumlah penduduk diatas 15 tahun	BPS, Disdik
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas	BPS, Disdik
2	Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau & berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata - rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang sejak lahir	BPS, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Angka Pengangguran Terbuka	%	Jumlah penganggur dibanding dengan jumlah angkatan keraja	BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatnya rasa aman dan tentram	Angka kriminal yang tertangani	Rasio Per-10.000 Penduduk	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Satpol PP
5	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG :</p> <p>1. Umur panjang dan sehat :</p> <p>1. Indikator: Angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki-laki.</p> <p>2. Indeks dimensi: Indeks Harapan Hidup perempuan, indeks harapan hidup laki - laki.</p> <p>3. Indeks sebaran merata : Indeks atau harapan hidup dengan sebaran merata.</p> <p>2. Pengetahuan:</p> <p>1. Indikator: AMH laki - laki, MYS laki-laki.</p> <p>2. Indeks dimensi: Indeks pendidikan perempuan, indeks pendidikan laki-</p>	BPS



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

				laki. 3. Indeks sebaran merata: Indeks pendidikan dengan sebaran merata. 3. Kehidupan yang layak : 1. Indikator : perkiraan pendapatan perempuan, perkiraan pendapatan laki-laki. 2. Indeks dimensi: Indeks pendapatan perempuan, indeks pendapatan laki-laki. 3. Indeks sebaran merata : indeks pendapatan dengan sebaran merata.	
6	Meningkatnya pengendalian penduduk dan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Ratio Pertumbuhan Penduduk	BPS
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase Penduduk Miskin	BPS
8	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	IPP terdiri dari lima domain: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP secara keseluruhan berada dalam rentang nilai 0-100, dengan interpretasi positif: semakin suatu capaian menuju ke indeks 100, capaian semakin baik	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	Besaran, kadar dan deskripsi parameter, katagori kimia anorganik, kimia organik, biologi fisik dan radioaktif yang digunakan sebagai persyaratan bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan menurut peruntukannya, dan telah ditetapkan melalui peraturan perundang - undangan.	Dinas Lingkungan Hidup
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	-Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	Nilai PDRB menurut lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan harga berlaku (Rp)	BPS
11	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan	-Nilai PDRB sektor industri pengolahan -Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan	Rupiah	Nilai PDRB menurut lapangan usaha sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	BPS



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		motor berdasarkan harga berlaku (Rp)	
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Nilai PDRB sub sektor Pariwisata menurut harga berlaku	Rupiah	Nilai PDRB sub sektor pariwisata menurut lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan harga berlaku (Rp)	BPS
13	Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah	-Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km) -Rasio jaringan irigasi. -Persentase rumah tangga bersanitasi	Rasio	$\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$ Panjang saluran irigasi ----- Luas lahan budidaya pertanian. $\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Dinas PUPR dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Meningkatnya pengendalian penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai RTRW. Rasio ketaatan dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Realisasi RTW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Dinas PUPR
15	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Rasio	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-Indeks Reformasi Birokrasi -Nilai SAKIP -Kategori LPPD -Opini BPK	-Nilai Indeks -Nilai dan Kategori -Kategori -Opini	Ukuran terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Implementasi SAKIP, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memetakan kemajuan yang sudah dicapai instansi pemerintah	Kemen PAN RB, Kemendagri dan BPK
17	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan publik (Skala 0-5)	Nilai Indeks	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik sesuai Permenpan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kemen PAN RB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Inpres nomor 7 tahun 1999 bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gowa tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

A. Capaian Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Gowa selaku pengemban amanah masyarakat Gowa melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa .

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai

tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gowa .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

TABEL 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 75 %	Kurang Berhasil

Secara umum Pemerintah Kabupaten Gowa telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021, namun demikian karena pada tahun 2021 merupakan masa transisi/pergantian pemegang kekuasaan dari Bupati sebelumnya kepada Bupati terpilih untuk periode Tahun 2021 - 2026, Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah utamanya mengacu pada RPJMD periode Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2

Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif	1. Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif (1)		Indeks Pembangunan Manusia
		1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
		3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender
			Indeks Pembangunan Pemuda
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi	2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah (2)		Pertumbuhan Ekonomi
			PDRB Per Kapita
		1. Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)
		2. Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka
		3. Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan
	4. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan	4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat (3)		Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB
		1. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien (4)		Indeks Reformasi Birokrasi
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik
		2. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD
			Nilai SAKIP
			Nilai IPKD

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

I. Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif

Dalam mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator sasaran.

TUJUAN 1. Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif

Tujuan 1 dijabarkan dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Capaian indikator **Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif** sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Tujuan Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	71,11	70,99	99,83

Kemajuan pembangunan manusia pada kabupaten Gowa sejak tahun 2020 terlihat dari perubahan status pembangunan manusia Kabupaten Gowa naik kelas atau mengalami peningkatan status pembangunan manusia dari berstatus 'sedang' pada 2019 berubah status menjadi 'tinggi' di tahun 2020 namun ditahun 2022 mengalami akselerasi yang lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga Capaiannya hanya sebesar 99,83 persen namun masih dalam batas kategori berhasil.

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Tujuan Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	70,62	70,99					99,83				

Perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan dimana pada tahun 2021 sebesar 70,62 meningkat menjadi 70,99 pada tahun 2022 atau meningkat 0,37 point (0,52 persen), perkembangan ini menjadi lebih rendah jika dibandingkan rata-rata peningkatan untuk periode RPJMD 2016-2021 sebesar 0,61 point (0,88 persen)

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

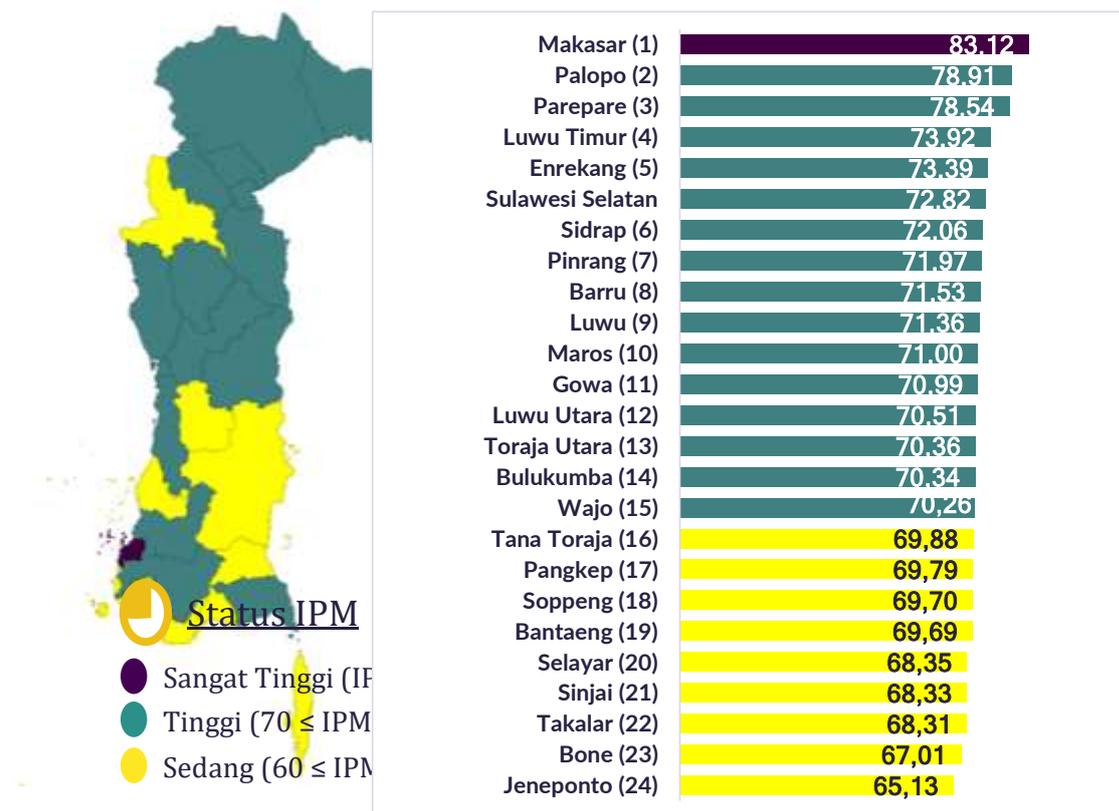
Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	73,09	70,99

Untuk mencapai target akhir RPJMD 2021-2026 IPM sebesar 73,09 ditahun 2026 Kabupaten Gowa masih membutuhkan akselerasi pencapaian sebesar 2,10 point atau kenaikan sebesar 2,95 persen. Peningkatan angka IPM menjadi 73,09 ditahun 2026 tersebut menandakan arah pembangunan daerah harus berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Tujuan Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	70,99	72,82 Peringkat 11	72,91

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pencapaian IPM kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 70,99 masih dibawah Capaian IPM provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,82 dan Indonesia sebesar 72,91. Di Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Kabupaten Gowa berada diperingkat 11 disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 3.1 Peta Tematik Status IPM dan Grafik IPM Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2022

Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan merealisasikan pengetahuan tersebut dalam Kajian produktif, sehingga masyarakat atau penduduk memiliki daya beli yang tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia.

IPM merupakan suatu indeks komposisi yang didasarkan pada 3 (tiga) indikator yakni, kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan.

Dalam RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 dijabarkan dalam dengan dalam 3 sasaran dengan uraian sebagai berikut :

SASARAN 1.1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan masyarakat.

Aksesibilitas pendidikan di kabupaten Gowa diarahkan untuk setiap peserta didik memperoleh kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan sementara itu pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator indeks Pendidikan disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	65,7	65,94	100,36

Aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat yang dicerminkan oleh indeks Pendidikan yang dibentuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi indeks Pendidikan di tahun 2022 sebesar 65,94 masih dibawah target yang direncanakan sebesar 65,70 sehingga capainnya hanya 100,36 persen pada **kategori sangat berhasil**.



Gambar 3.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa 2010-2022

Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun dengan cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. Sedangkan angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai. Trend perkembangan indeks Pendidikan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	65,25	65,94					100,36					

Perkembangan indeks Pendidikan kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 65,25 menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 65,94 mengala peningkatan sebesar 0,69 point (1,057 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	71,99	65,94

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks Pendidikan sebesar 71,99 masih membutuhkan 6,05 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	65,94	66,35	65,36

Pencapaian Indeks pendidikan kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 65,94 masih dibawah Capaian Indeks Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan sebesar 66,35 namun masih diatas pencapaian Indonesia sebesar 65,36, artinya masih diperlukan upaya kerja keras dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan sehingga kabupaten Gowa bisa seperti rata-rata kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.11
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	100,36	87,76	12.60

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan masyarakat dengan indikator indeks Pendidikan mengalami efisiensi anggaran sebesar 12,60. Meski mengalami efisiensi tetapi tetap menjadi perhatian untuk menjadi bahan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

SASARAN 1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator indeks Kesehatan yang dikembangkan dari umur harapan hidup disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	77,90	78,00	100,12

Indeks Kesehatan merupakan indikator utama untuk menilai kinerja Kesehatan di Kabupaten Gowa yang ditargetkan akan mencapai 77,90 pada tahun 2022 dan terealisasi sebesar 78,00 dengan Capaian 100,12 persen namun masih dalam kategori capaian kinerja sangat Berhasil. Tidak tercapainya target indeks Kesehatan disebabkan karena umur harapan meningkat sebesar 0,25 tahun (0,35 persen), secara lengkap perkembangan umur harapan hidup disajikan dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 3.3 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Gowa 2010-2022

Secara umum umur harapan hidup di Kabupaten Gowa meningkat dari tahun ke tahun peningkatan ini berimplikasi pada peningkatan indeks Kesehatan di Kabupaten Gowa dimana Capaian tahun 2021 sebesar 77,62 persen meningkat 0,38 poin menjadi 78 persen di tahun 2022.

Tabel 3.13

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	77,62	78,00					100,12					

Perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan dimana pada tahun 2021 sebesar 70,62 meningkat menjadi 70,99 pada tahun 2022 atau meningkat 0,37 point (0,52 persen), perkembangan ini menjadi lebih rendah jika dibandingkan rata-rata peningkatan untuk periode RPJMD 2016-2021 sebesar 0,61 point (0,88 persen)

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	78,85	78,00

Capaian Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indeks Kesehatan jika dibandingkan dengan target realisasi tahun akhir RPJMD 2026 sebesar 78,85 persen berarti masih menyisakan 0,85 point untuk bisa mencapai target tersebut.

Untuk mencapai target akhir RPJMD 2021-2026 IPM sebesar 73,09 ditahun 2026 Kabupaten Gowa masih membutuhkan akselerasi pencapaian sebesar 2,10 point atau kenaikan sebesar 2,95 persen. Peningkatan angka IPM menjadi 73,09 ditahun 2026 tersebut menandakan arah pembangunan daerah harus berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan target Nasional dan Provinsi untuk sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator indeks Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	78,00	78,42	79,77

Angka Indeks Kesehatan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan dibidang Kesehatan sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai Indeks Kesehatan suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatannya semakin baik. Pencapaian Indeks

Kesehatan kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 78,00 persen masih dibawah Capaian indeks kesehatab provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,42 dan Indonesia sebesar 79,77

Tabel 3.16

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	99,98	83,40	16,58

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan mengalami efisiensi anggaran sebesar 83,40 sedangkan capaian kinerja mencapai 99,98 . Capaian efisiensi anggaran sebesar 16,58 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang sangat efektif dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

SASARAN 1.3 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran dan tindakan masyarakat terhadap pembangunan yang nantinya akan diaplikasikan dalam pelaksanaan maupun implementasi pembangunan yang diukur dengan indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan pemuda.

Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi sedangkan indeks pembangunan pemuda merupakan alat ukur **partisipasi pemuda dalam pembangunan dalam 5** (lima) domain dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja dan Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi dengan Capaian sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	79.25	87,83	110,82
	Indeks Pembangunan Pemuda	42.50	43,32	101,92
Rata-Rata				106,37

Gambaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tercermin dalam partisipasi perempuan dan Pemuda yang diukur dengan Indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan pemuda menunjukkan Capaian rata-rata sebesar 106,37 persen pada kategori Sangat Berhasil, yang dikontribusi oleh Capaian indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan pemuda dengan Capaian 110,82 persen dan 101,92 persen keduanya pada kategori Sangat Berhasil.

Perkembangan realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada indikator indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan pemuda disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	<u>78.94</u>	<u>87.83</u>					<u>110.82</u>				
	Indeks Pembangunan Pemuda	<u>42</u>	<u>43.32</u>					<u>101.92</u>				

Perkembangan indeks pembangunan Gender menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana di tahun 2021 sebesar 78,94 menjadi 87,83 ditahun 2022 atau meningkat 8,89 point (11,26 persen). Sementara itu perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa mengalami peningkatan 2 tahun terakhir dengan dimana pada tahun 2021 sebesar 42 meningkat menjadi 43,32 pada tahun 2022 atau meningkat 1,32 point (3,14 persen),

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	80,52	87,83
	Indeks Pembangunan Pemuda	44,50	43,32

Untuk mencapai target akhir RPJMD 2021-2026 Indeks Pembangunan Gender sebesar 80,52 ditahun 2026 Kabupaten Gowa telah melampaui target RPJMD ditahun 2022 sementara itu untuk indeks pembangunan Pemuda Kabupaten Gowa masih membutuhkan akselerasi pencapaian sebesar 1,18 point atau kenaikan sebesar 2,72 persen.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87,83	93,14	91,63
	Indeks Pembangunan Pemuda	43,32	Belum ada Data	Belum ada Data

Jika dibandingkan dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Indeks pembangunan gender Kabupaten Gowa masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. Demikian pula untuk indeks pembangunan pemuda Kabupaten Gowa juga masih dibawah rata-rata provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Tabel 3.21
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	110,82	92,86	17,96
	Indeks Pembangunan pemuda	101,92	88,39	13,53

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator indeks pembangunan gender mengalami efisiensi anggaran sebesar 17,96 sedangkan indeks pembangunan pemuda mengalami efisiensi anggaran sebesar 13,53. Meski efisiensi anggaran terbilang besar namun capaian kinerja menunjukkan sangat berhasil.

II. Misi 2 : MEMPERKOKOH KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN TEKNOLOGI

Dalam mencapai misi tersebut diatas dikembangkan sebanyak 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator sasaran dengan penjelasan sebagai berikut:

TUJUAN 1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah

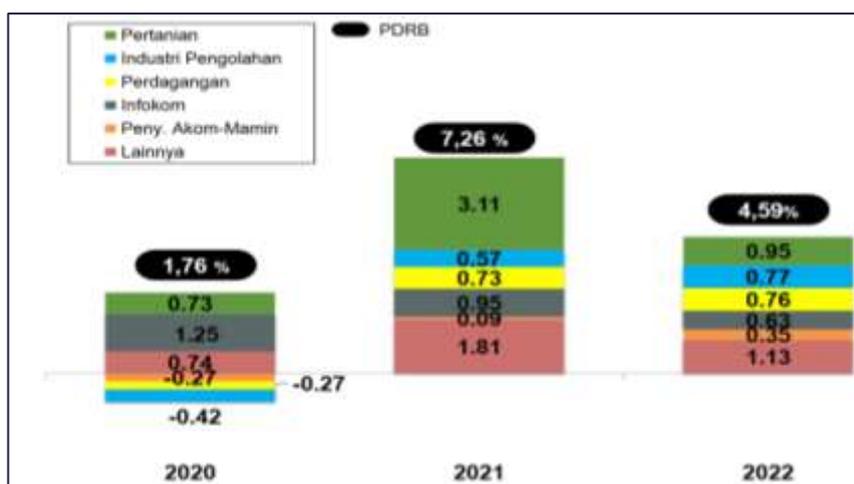
Tujuan 1 dijabarkan dalam 2 indikator yaitu pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Sedangkan PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Capaian indikator tujuan Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Tujuan Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6,38	4,59	71,94
	PDRB Per Kapita	28,15	32,7	116,16
Rata-Rata				94,05

Secara rata-rata Capaian indikator tujuan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah sebesar 94,05 persen pada kategori **Berhasil** yang dikonstruksi oleh pertumbuhan ekonomi yang hanya berhasil tumbuh sebesar 4,59 persen jauh dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 6,38 persen dengan Capaian 71,94 kategori **Kurang**. Sedangkan PDRB perkapita terealisasi sebesar 32,7 Juta melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 28,15 Juta dengan Capaian 116,16 persen pada kategori **Sangat Berhasil**.

Pelambatan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2022 disebabkan oleh karena lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Gowa mengalami pelambatan antara lain sektor pertanian yang sebelumnya tumbuh sebesar 3,11 persen hanya sebesar 0,95 persen yang disebabkan oleh penurunan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Gowa.



Gambar 3.4 Perbandingan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022 menurut Lapangan Usaha

Tabel 3.23
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Tujuan Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6,38	4,59					71,94				
	PDRB Per Kapita	28,15	32,7					116,16				

Secara trend Perekonomian Kabupaten tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika dibandingkan tahun 2021 mengalami pelambatan pertumbuhan sebesar 4,59 persen sedangkan PDRB perkapita tahun 2022 jika dibandingkan dengan PDRB perkapita tahun 2021 mengalami peningkatan 28,15 juta meningkat menjadi 32,7 Juta. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,12 persen.

Tabel 3.24
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	7,44	4,59
	PDRB Per Kapita	29,55	32,7

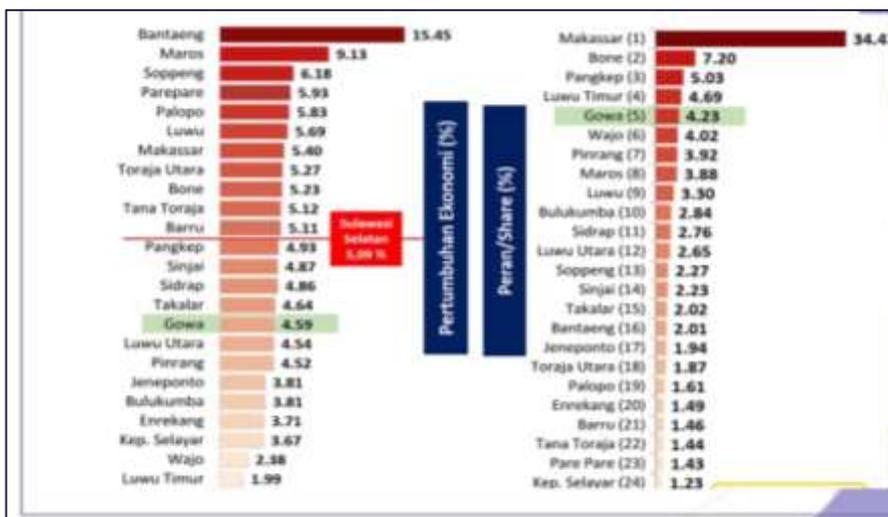
Jika dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD 2021-2026 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2022 masih jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 7,44 persen sedangkan PDRB Perkapita sudah melampaui target akhir RPJMD sebesar 32,7 Juta .

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Tujuan Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,59	5,09	3,69
	PDRB Per Kapita	32,7	65,59	71,03

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 4,59 persen masih melebihi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69 persen namun dibawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan sebesar 5,09. Peran perekonomian Kabupaten Gowa terhadap perekonomian Sulawesi selatan tahun 2022 sebesar 4,23 persen dimana Kabupaten Gowa memberikan kontribusi terbesar ke-5 dari 24 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Sedangkan secara urutan pertumbuhan ekonomi kabupaten Gowa tertinggi ke-16 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.



Gambar 3.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Peran (Share) Ekonomi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022

Sasaran 2.1. Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) disajikan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.26

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	8,06	7,85	97,32

Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) terealisasi sebesar 7,85 persen terealisasi dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 7,85 persen dengan Capaian 97,32 persen.

Tabel 3.27

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA						
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,32	7,85											

Perkembangan Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 7,32 persen mengalami peningkatan sebesar 0,653 point (7,24 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sasaran Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,25	7,85

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) sebesar 7,85 persen sudah melampaui konsistensi pertumbuhan yang harus dicapai sebesar 7,25 persen.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,85	3,57	5,36

Pencapaian Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 7,85 persen sudah diatas Capaian Capaian Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,57 dan pencapaian Indonesia sebesar 5,36 persen.

Tabel 3.30
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	97,32	99,9	12,99

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sector unggulan daerah dengan indikator pertumbuhan sector unggulan dalam PDRB (pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan) mengalami efisiensi anggaran sebesar 12,99% sedangkan capaian kinerja mencapai 97,32%. Capaian efisiensi anggaran sebesar 99,99 % menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang sangat efektif dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

Sasaran 2.2. Meningkatkan kesempatan kerja

Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan, Capaian indikator sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.31
Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,25	3,26	137,90

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 3,26 persen lebih rendah dari Capaian yang telah ditetapkan sebesar 5,25 persen atau Capaian 137,90 persen pada kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.32

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30	3,26					137,90					

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka KABUPATEN GOWA indeks Pendidikan kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 65,25 menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 65,94 mengala peningkatan sebesar 0,69 point (1,057 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.33

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93	3,26

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks Pendidikan sebesar 71,99 masih membutuhkan 6,05 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26	4,52	5,90

Pencapaian Indeks pendidikan kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 65,94 masih dibawah Capaian Indeks Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan sebesar 66,35 namun masih diatas pencapaian Indonesia sebesar 65,36, artinya masih diperlukan upaya kerja keras dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan sehingga kabupaten Gowa bisa seperti rata-rata kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.35
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	137,90	91,09	46,81

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tidak pengangguran terbuka mengalami efisiensi anggaran sebesar 91,09 % sedangkan capaian kinerja mencapai 137,01%. Capaian efisiensi anggaran sebesar 46,81 % menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang sangat efektif dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Apalagi, capaian kinerja melebihi target yakni sebesar 137,90%.

Sasaran 2.3. Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hamper di seluruh daerah di Indonesia muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas

juga rendah.

Sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi golongan menengah masyarakat kurang mampu dengan indikator Angka kemiskinan disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.36

Capaian Indikator Sasaran Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	7,4	7,36	104

Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 7,36 masih dibawah target yang direncanakan sebesar 7,08 persen sehingga capainnya hanya 104 persen namun sudah berada pada **kategori yang sangat berhasil**.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa tahun 2022 telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin, namun terpaan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dampaknya masih berlanjut menjadi krisis menyebabkan keterpurukan ekonomi yang Kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin. Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif.

Tabel 3.37

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	7,54	7,36						96,04				

Secara trend perkembangan angka kemiskinan di kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 7,36 persen menunjukkan trend penurunan dari tahun 2021 sebesar 7,54 mengalami penurunan sebesar 0,18 point (2,44 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.38
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	6,48	7,36

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks angka kemiskinan sebesar 7,36 persen telah melampaui masih membutuhkan 0,88 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi
Indikator Sasaran Sasaran Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan
Masyarakat Kurang Mampu

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	7,36	9,57	8,63

Pencapaian Angka kemiskinan kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 7,36 persen masih dibawah Capaian angka kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9,57 persen dan angka kemiskinan Nasional sebesar 8,63 walaupun demikian persoalan saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan angka kemiskinan ekstrem dan angka stunting pada keluarga miskin.



Gambar 3.6. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022

Tabel 3.40
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Berkembangnya Kegiatan Ekonomi Golongan Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	96,04	90,95	5,09

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dengan indikator angka kemiskinan mengalami efisiensi anggaran sebesar 8,01% sedangkan capaian kinerja mencapai 96,04%. Capaian efisiensi anggaran sebesar 8,01% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang cukup efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

Sasaran 2.4. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Membicarakan masalah ketimpangan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai pembangunan, karena ketimpangan sering kali dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah capaian Indikator sasaran menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator indeks Gini ratio sebagai berikut :

Tabel 3.41

Capaian Indikator Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya Ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	0,327	0,364	88,68

Sasaran menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh indeks gini ratio kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 0,364 berada diatas target yang direncanakan sebesar 0,327 sehingga capainnya hanya 88,68 persen pada **kategori cukup berhasil**. Trend perkembangan indeks Gini Ratio disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.42

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA						
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	0,358	0,364						88,68					

Perkembangan indeks Gini Ratio kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 0,358 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,364 mengalami peningkatan sebesar 0,006 point (1,67 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.43
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	0,291	0,364

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks Gini ratio sebesar 0,291 masih membutuhkan 0,006 point atau masih membutuhkan penurunan sebesar 1,67 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	0,364	0,377	0,381

Pencapaian gini ratio kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 0,364 merupakan pencapaian yang cukup baik karena berada dibawah Capaian indeks Gini Ratio provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377 dan Nasional sebesar 0,381.



Gambar 3.7. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022

Tabel 3.45

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	88,68	90,70	-2,02

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator Gini ratio mengalami inefisiensi anggaran sebesar -2,02 % sedangkan capaian kinerja mencapai 88,68% dan Capaian keuangan 90,70.

III. Misi 3 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, TERINTEGRASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dalam mencapai misi 3 tersebut diatas dikembangkan sebanyak 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator sasaran dengan penjelasan sebagai berikut:

TUJUAN 1. MENINGKATKAN AKSESSIBILITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR MASYARAKAT

Tujuan 1 dijabarkan dalam 1 indikator yaitu Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB, sector atau bidang infrastruktur layanan dasar dikembangkan pada 7 lapangan usaha masing-masing : Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi dengan Capaian disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.46
Capaian Indikator Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	8,18	7,04	83,74 %

Secara rata-rata Capaian indikator tujuan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat sebesar 7,04 persen pada kategori Cukup **Berhasil** yang dikonstruksi oleh Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB berhasil tumbuh sebesar 7,04 persen dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 8,18 persen dengan Capaian 83,74 kategori **Cukup berhasil**.

Tabel 3.47
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Tujuan Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	5,36	7,04					83,74				

Secara trend pertumbuhan sector bidang infrastruktur dalam PDRB mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 31,43 persen pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan PDRB Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB tahun 2021 sebesar 5,36 persen.

Tabel 3.48
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah indikator Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	8,24	7,04

Jika dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD 2021-2026 Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB Kabupaten Gowa tahun 2022 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 7,04 persen atau masih harus diakselerasi sebesar (0,12 point) atau sebesar 17,04 persen.

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	7,04	7,13	5,29

Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB Kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 7,04 persen masih melebihi angka Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB Sulawesi Selatan sebesar 7,13 persen dan Nasional sebesar 5,29 persen.

SASARAN 3.1. TERPENUHINYA INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK YANG TERPADU DAN TERINTEGRASI

Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi dikembangkan menjadi indikator indeks infrastruktur daerah disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.50

Capaian Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Terpenuhinya Infrastruktur Layanan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	57,29	58	101,24

Indeks infrastruktur daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 58 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 57,29 persen dengan Capaian 101,24 persen pada kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.51

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpenuhinya Infrastruktur Layanan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	50	58					101,24					

Perkembangan Indeks Infrastruktur Daerah kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 58 persen menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 50 persen mengalami peningkatan sebesar 8 point (16 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.52
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur
layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Terpenuhinya Infrastruktur Layanan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	65	58

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks Infrastruktur Daerah sebesar 58 persen masih membutuhkan 7 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.53
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator
Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Terpenuhinya Infrastruktur Layanan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	58	81,48	Belum ada Data

Pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 58 persen masih dibawah Capaian Indeks Infrastruktur Daerah provinsi Sulawesi Selatan sebesar 81,48 persen.

Tabel 3.54
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Terpenuhinya Infrastruktur Layanan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	101,24	73,13	28,11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan public yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator indeks infrastruktur

daerah mengalami efisiensi anggaran sebesar 28,11% sedangkan capaian kinerja mencapai 101,24%. Capaian efisiensi anggaran sebesar 28,11% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang cukup efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

SASARAN 3.2. BERKEMBANGNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Capaian sasaran Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan dengan indikator indeks Desa Membangun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.55

Capaian Indikator Berkembangnya Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6836	0,7618	111,44

Indeks Desa Membangun Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 0,7618 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,6836 atau Capaian 111,44 persen pada kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.56

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,724	0,761					111,14				

Perkembangan Indeks Desa Membangun kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 0,7618 menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 0,724 mengalami peningkatan sebesar 0,037 point (5,11 persen). Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.57
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,714	0,761

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk Desa Membangun sebesar 0,714 masih membutuhkan 0,47 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan Publik yang terpadu dan terintegrasi

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,7618	0,6724	0,7019

Pencapaian Indeks Desa Membangun kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 0,7618 sudah diatas Capaian Indeks Desa Membangun provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,6724 dan Indonesia sebesar 0,701.

Tabel 3.59
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	111,44	90,46	20,98

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan dengan indikator indeks Desa membangun mengalami efisiensi anggaran sebesar 20,98 % sedangkan capaian kinerja mencapai 111,44%. Capaian efisiensi anggaran sebesar 20,98 % % menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang cukup efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

SASARAN 3.3. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas lapangan kerja dengan indikator indikator kualitas lingkungan hidup disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.60

Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60-70 (Cukup Baik)	64,51	100,00

Indeks kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 64,51 persen memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 60-70 persen (kategori Cukup Baik) artinya pembangunan kulaitas lingkungan hidup bisa disimpulkan pada kategori **Berhasil**.

Tabel 3.61

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,99	64,51					100					

Perkembangan Capaian indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 64,51 menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 62,99 mengalami peningkatan sebesar 1,52 point (2,41 persen), trend positif peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan meningkat dari tahun ke tahun . Realisasi Kinerja yang

mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.62

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(70-80) Baik	64,51

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 70-80 pada kategori Baik masih membutuhkan 5,79 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.63

Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,51	74,17	72,42

Pencapaian Indeks Kualitas lingkungan hidup kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 64,51 masih dibawah Capaian kualitas lingkungan hidup provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,17 dan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia sebesar 72,42, artinya masih diperlukan upaya kerja keras dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan sehingga kabupaten Gowa bisa seperti rata-rata kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.64

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	97,57	2,43

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks lingkungan hidup mengalami efisiensi anggaran sebesar 2,43 %

sedangkan capaian kinerja mencapai 100 % dan Capaian keuangan 07,57 persen. Capaian efisiensi anggaran sebesar 2,43 % menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang cukup efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

IV. MISI IV : MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Dalam mencapai misi 4 tersebut diatas dikembangkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator sasaran dengan penjelasan sebagai berikut:

TUJUAN 1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN AKUNTABEL YANG MELAYANI, EFEKTIF DAN EFISIEN

Tujuan 1 mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien dijabarkan dalam 1 indikator yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi** dengan Capaian disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.65

Capaian Indikator Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Akuntabel Yang Melayani, Efektif dan Efisien

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	60-70 (B)	58,65	97,75

Capaian indikator tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien yaitu indeks reformasi birokrasi sebesar 58,65 pada kategori CC yang masih lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan sebesar 60-70 (kategori B) serta capaian sebesar 97,75 persen pada kategori Berhasil yang berkontribusi oleh beberapa komponen sebagai berikut :

Tabel 3.66
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
A	Komponen Pengungkit	
I	Pemenuhan	10,38
II	Hasil Antara Area Perubahan	5,48
III	Reform	12,7
Total Komponen Pengungkit		28,56
B	Komponen Hasil	
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,67
2	Kualitas Pelayanan Publik	8,22
3	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	8,08
4	Kinerja Organisasi	6,12
Total Komponen Hasil		30,09
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		58,65

Tabel 3.67

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Akuntabel Yang Melayani, Efektif dan Efisien

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	56,45 (CC)	58,65					97,75					

Secara trend indeks reformasi birokrasi Kabupaten Gowa secara nilai cenderung lebih baik dengan nilai 56,45 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 58,65 pada tahun 2022.

Tabel 3.68

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah indikator Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Akuntabel Yang Melayani, Efektif dan Efisien

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	70 - 80 (BB)	58,65

Jika dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD 2021-2026 Indeks Reformasi birokrasi Kabupaten Gowa tahun 2022 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 79-80

(kategori BB) persen atau masih membutuhkan nilai 11,35 poin atau sebesar 16,21 persen.

Tabel 3.69
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Akuntabel Yang Melayani, Efektif dan Efisien

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Akuntabel Yang Melayani, Efektif dan Efisien	Indeks RB	58,65	-	54,44

Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 58,65 masih melebihi nilai rata-rata nasional indeks reformasi Birokrasi Nasional sebesar 54,44 persen sementara untuk Sulawesi Selatan belum diperoleh data.

SASARAN 4.1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dikembangkan menjadi indikator Indeks Pelayanan publik daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.70
Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,01 – 4,50 (A-)	4	99,75

Indeks pelayanan publik daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi dengan nilai 4 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 4,01 – 4,50 atau Capaian 99,75 persen pada kategori **Berhasil**.

Tabel 3.71

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,02	4					99,75				

Perkembangan Capaian indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 64,51 menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 62,99 mengalami peningkatan sebesar 1,52 point (2,41 persen), trend positif peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.72

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator **Sasaran** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,51-5,00 (A)	4

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 70-80 pada kategori Baik masih membutuhkan 5,79 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.73

Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator **Sasaran** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4	-	-

Pencapaian Indeks Kualitas lingkungan hidup kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 64,51 masih dibawah Capaian kualitas lingkungan hidup provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,17 dan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia sebesar 72,42, artinya masih diperlukan upaya kerja keras dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan sehingga kabupaten Gowa bisa seperti rata-rata kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.74

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	99,75	89,57	10,18

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator indeks pelayanan public mengalami efisiensi anggaran sebesar 10,18 % sedangkan capaian kinerja mencapai 99,75 % dan Capaian keuangan 89,57 persen. Capaian efisiensi anggaran sebesar 10,18 % menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang cukup efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

SASARAN 4.2. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikembangkan menjadi indikator nilai LPPD, Nilai SAKIP dan nilai Indeks pengelolaan keuangan Daerah daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.75

Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target PK 2022	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3.76 (Tinggi)	Belum ada data	-
	Nilai SAKIP	60-70 (B)	66,67	100
	Nilai IPKD	60-80	65	100
Rata-Rata				100

Dari 3 indikator yang diukur baru 2 indikator yang ada datanya yaitu Nilai SAKIP sebesar 66,67 dengan realisasi sebesar 66,67 (kategori B) sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebesar 60-70 (kategori B) dengan Capaian sebesar 100 persen pada kategori Sangat Berhasil demikian pula dengan indikator Nilai Indeks pengelolaan keuangan Daerah dengan target 60-80 dan realisasi 65 dengan capaian 100 persen.

Tabel 3.76

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indikator Sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3.66 (Tinggi)	65					100				
	Nilai SAKIP	65,38 (B)	66,67					100				
	Nilai IPKD	60-80	65					100				

Perkembangan Capaian nilai SAKIP kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 66,67 walaupun tidak bisa dibandingkan dengan nilai tahun 2021 karena indikator penilaiannya berbeda menunjukkan trend yang positif dengan nilai tahun 2021 sebesar 65,38, trend positif peningkatan nilai SAKIP meningkat dari tahun ke tahun meskipun baru pada kategori B. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.77

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator **Sasaran** Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	4.41 (Sangat Tinggi)	Belum ada Data
	Nilai SAKIP	70-80 (BB)	66,67
	Nilai IPKD	60-80	65

Jika dibandingkan dengan pemenuhan target tahun akhir RPJMD untuk nilai SAKIP sebesar 80-90 pada kategori A masih membutuhkan 13,34 point yang harus dipenuhi selama 4 tahun hingga akhir tahun 2026. Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Nasional dan Provinsi Indikator Sasaran Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN TAHUN 2022		
		Kab.Gowa	Provinsi	Nasional
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Belum ada Data	Belum ada Data	Belum ada Data -
	Nilai SAKIP	66,67	67,88	61,60
	Nilai IPKD	65	Belum ada Data	Belum ada Data

Pencapaian Nilai SAKIP kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 66,67 masih dibawah nilai SAKIP provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,88 namun sudah diatas pencapaian rata-rata nasional sebesar 61,60, artinya masih diperlukan upaya kerja keras dalam hal peningkatan kualitas nilai SAKIP utamanya pada area kualitas dan pemanfaatan sehingga kabupaten

Tabel 3.79
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan	Tingkat efisiensi
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Belum ada data		
	Nilai SAKIP	100	97,20	
	Nilai IPKD	100	88,52	
Rata-Rata		100	92,86	7,13

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator indeks Nilai LPPD, Nilai Sakip dan Nilai IPKD mengalami capaian anggaran sebesar 92,86 % sedangkan capaian kinerja mencapai 100 % . Capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,13 % menunjukkan bahwa kinerja pemerintah terbilang cukup efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

C. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dan Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang dilakukan

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator Indeks Pendidikan, di mana tercapai sebesar 65,94 dari target tahun 2022 yaitu 65,70 atau sebesar 100,36 %. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu program pengelolaan pendidikan dengan melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Murni SD/MI. Variabel pembentuk indeks pendidikan yaitu angka Harapan Lama Sekolah 13,66 dan Rata-rata Lama Sekolah 8,40 juga mengalami kenaikan sehingga indeks pendidikan juga meningkat dan mencapai target. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari berbagai Inovasi bidang Pendidikan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gowa seperti Program Mahasantri, Sistem Kelas tuntas Berkelanjutan, Pendidikan gratis, investasi SDM Seperempat Abad, Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana, PAUD SPAS dan Perpustakaan Desa serta Imtaq Indonesia.
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan, di mana tercapai sebesar 78 dari target tahun 2022 yaitu 77,90 atau sebesar 100,12 %. Program-program yang mendukung capaian ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang merupakan upaya pemenuhan SPM urusan Kesehatan. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi mengalami
-

perbaikan dibanding tahun sebelumnya yang mendukung peningkatan kinerja daerah. Selain itu berkat kolaborasi dan komitmen Kabupaten Gowa untuk bersama-sama dalam penanganan *stunting*, Angka harapan hidup juga meningkat sebesar 70,70 sehingga indeks kesehatan meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya umur harapan hidup maka perlu diperhatikan penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia. Selain itu beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan ini antara lain seperti Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Bontempo, Pembangunan Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf dan pembangunan puskesmas Rawat inap pada semua kecamatan.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan 2 indikator masing-masing Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda. Capaian rata-rata sasaran ini sebesar 106,37 persen pada kategori Sangat Berhasil, yang dikonstruksi oleh Capaian indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan pemuda dengan Capaian 110,82 persen dan 101,92 persen keduanya pada kategori Sangat Berhasil. Hal ini karena dukungan beberapa program di antaranya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan.
 4. Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 3,26 persen lebih rendah dari Capaian yang telah ditetapkan sebesar 5,25 persen atau Capaian 137,90 persen pada kategori **Sangat Berhasil**, hal ini didukung oleh beberapa program antara lain : program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program hubungan industrial.
 5. Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dengan indikator angka kemiskinan terealisasi sebesar 7,36 masih dibawah target yang
-

direncanakan sebesar 7,08 persen sehingga capainnya hanya 96,04 persen namun sudah berada pada kategori yang berhasil. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa tahun 2022 telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin, namun terpaan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dampaknya masih berlanjut menjadi krisis menyebabkan keterpurukan ekonomi yang Kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah : program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana serta program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

6. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator Indeks infrastruktur daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 58 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 57,29 persen dengan Capaian 101,24 persen pada kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan konsisten mengalokasikan anggaran infrastruktur 25 persen bahkan pelambatan pembangunan infrastruktur akibat refocusing kegiatan akibat Covid 19 diupayakan dengan melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa program yang dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran ini antara lain program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), program penyelenggaraan jalan, program penyelenggaraan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, program kawasan permukiman, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penataan bangunan gedung, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengembangan jasa konstruksi.
 7. Berkembangnya Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 0,7618 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,6836 atau
-

Capaian 111,44 persen pada kategori **Sangat Berhasil**. Perkembangan Indeks Desa Membangun kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 0,7618 menunjukkan trend yang positif dari tahun 2021 sebesar 0,724 yang tidak terlepas dari dukungan program peningkatan kerja sama desa, program administrasi pemerintahan desa program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

8. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 terealisasi sebesar 64,51 persen memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 60-70 persen (kategori Cukup Baik) artinya pembangunan kualitas lingkungan hidup bisa disimpulkan pada kategori Berhasil. Beberapa program yang mendukung keberhasilan sasaran ini adalah : program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan
 9. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikembangkan menjadi indikator Indeks Pelayanan publik daerah terealisasi sebesar 58 persen lebih rendah dari Capaian yang telah ditetapkan sebesar 5,25 persen atau Capaian 137,90 persen pada kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan sasaran ditunjang dengan upaya Pemerintah Kabupaten Gowa dalam perbaikan pelayanan public melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Pembangunan Pos Pelayanan Publik untuk daerah 9 kecamatan terpencil dataran tinggi yang merupakan replikasi miniatur Mall Pelayanan Publik di Kecamatan.
-

10. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikembangkan menjadi indikator nilai LPPD, Nilai SAKIP dan nilai Indeks pengelolaan keuangan Daerah daerah. Dari 3 indikator yang diukur baru 2 indikator yang ada datanya yaitu Nilai SAKIP sebesar 66,67 dengan realisasi sebesar 66,67 (kategori B) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 60-70 (kategori B) dengan Capaian sebesar 100 persen pada kategori Sangat Berhasil demikian pula dengan indikator Nilai Indeks pengelolaan keuangan Daerah dengan target 60-80 dan realisasi 65 dengan capaian 100 persen, Secara rata-rata Capaian sasaran ini adalah 100 persen atau kategori Berhasil. Beberapa program yang mendukung kegiatan ini antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh semua Perangkat Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan kecamatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan serta pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan inspektorat, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dengan seluruh stakeholder yang dilakukan Bappeda dalam rangka kolaborasi/cross cutting menyelesaikan isu strategis daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menjaga keselarasan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran. Selain itu peningkatan PAD terus diupayakan menuju kemandirian fiskal. Dalam rangka perbaikan kinerja, maka diperlukan perencanaan yang efektif menyelesaikan gap kinerja dan permasalahan aktual. Oleh karena itu pada penyusunan perencanaan tahun 2024 diupayakan perbaikan dengan melaksanakan forum lintas Perangkat Daerah bersama stakeholder dengan cross cutting pada isu strategis yang terdapat di RKPD dan tematik cross cutting arah kebijakan tahun pertama dan permasalahan aktual.

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) terealisasi sebesar 7,85 persen terealisasi dibawa target yang telah ditetapkan sebesar 7,85 persen dengan Capaian 97,32 persen. Ketidakberhasilan mencapai target di tahun ini imbas melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 4,59 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,38 persen yang tentu saja kontribusi kedua lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang signifikan yang disebabkan oleh penurunan produksi sebagai akibat perubahan pola tanam hampur pada tanaman padi yang menyebabkan produktivitasnya rendah tercatat produksi gabah kering giling menurun tahun 2021 sebesar 237.863 ton dan tahun 2022 sebesar 231.035 ton sebagai penyumbang terbesar dilapangan usaha ini walaupun luas panen jagung, cabai dan kentang meningkat. Beberapa program yang diharapkan bisa meningkatkan Capaian sasaran ini pada tahun 2023 antara lain: program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian dan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

Sementara itu beberapa kegiatan dan investasi pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa diharapkan bisa mengungkit pencapaian sasaran ini antara lain : pengembangan sapi perah, pembangunan industry pengolahan susu dan pariwisata Cimory Dairyland, penangkaran bibit kentang dan pengembangan produksi porang dan Rumah Produktif klinik UMKM.

2. Menurunnya Ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator oleh indeks gini ratio kabupaten Gowa tahun 2022 sebesar 0,364 berada diatas target yang direncanakan sebesar 0,327 sehingga capainnya hanya 88,68 persen pada kategori cukup berhasil. Kondisi diperkuat dengan penurunan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan meningkatnya nilai gini ratio jika dibandingkan dengan tahun 2021, beberapa faktor yang menyebabkan hal

tersebut masih besarnya Penduduk miskin ekstrem kabupaten Gowa sebesar 1,15 persen atau 9,06 ribu jiwa pada tahun 2022. Strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa untuk menindaklanjuti kemiskinan ekstrem antara lain menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil dan melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Pada tahun 2023 besar anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp265.881.742.730 melalui serangkaian Upaya optimalisasi peran serta puskesmas dan memaksimalkan *update* data kemiskinan ekstrem *by name, by address* dan *by needs* sehingga penanganannya dapat optimal sesuai kebutuhan dan dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu sebagai bentuk kolaborasi antar Perangkat Daerah agar terjadi kesinambungan program dan kegiatan pemerintah dengan pengentasan kemiskinan, maka *update* data kesejahteraan sosial yang akan dijadikan DTKS menjadi data/objek/kelompok sasaran setiap kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Isu strategis kemiskinan dijadikan prioritas untuk diselesaikan secara bersama *cross cutting* pada perencanaan berikutnya. Setiap Perangkat Daerah mengetahui peran dan irisan/kolaborasi yang dilakukan untuk turut menangani kemiskinan. Sehingga diharapkan penanganan kemiskinan menjadi terpadu efektif dan efisien;



BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam bentuk penyerahan tugas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara umum untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kabupaten Gowa.

Sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran yang bervariasi sesuai formula tersebut. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengalokasian dan penatausahaan program ini terletak pada 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa.

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten Gowa meliputi peningkatan usaha ekonomis produktif, pemeliharaan dan pemupukan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan stimulan gotong royong. Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan antara lain dengan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana serta dukungan ketersediaan operasional.

Adapun Tugas-tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2022, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.



Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Kementerian Pertanian	TP (DIPA. 018.03.4.199125) Tanggal 29 Januari 2019	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 240.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
				Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier	Kab. Gowa	Rp.2.025.000.000,-	Rp.2.025.000.000,-
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
			Layanan Perkantoran	Layanan Dukungan Satker	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp. 100.000.000,-	Rp. 95.000.000,-
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Kab. Gowa	Rp. 241.600.000,-	Rp. 241.600.000,-
				Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pestisida	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pestisida	Kab. Gowa	Rp. 136.730.000,-	Rp. 136.730.000,-
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Asuransi Pertanian	Asuransi Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 19.700.000,-	Rp. 16.700.000,-
			Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Optimasi Lahan	Optimasi Lahan	Kab. Gowa	Rp. 120.375.000,-	Rp. 120.375.000,-
				Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Kab. Gowa	Rp.2.842.500.000,-	Rp.2.842.500.000,-



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun 2020 (DIPA. 018.08.199133/2020 Tgl 07 Januari 2020	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kab. Gowa	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
				Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Kab. Gowa	Rp. 16.500.000,-	Rp. 16.500.000,-
				Layanan Keuangan	Belanja Honor Operasional Satker	Kab. Gowa	Rp. 27.000.000,-	Rp. 27.000.000,-
				Pasca Panen, Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan, Pembinaan, Monev Sarana Pasca Panen	Kab. Gowa	Rp. 14.060.000,-	Rp. 14.060.000,-
3	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan DIPA- 026.13.2.452652/2021 Tanggal 23 November 2020	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Binalattas	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gowa	Rp. 564.404.000,-	Rp.550.355.500,-
4	Kementerian Perdagangan	SP DIPA- 090.02.4.190244/2021	Peningkatan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Rakyat Sapaya Kec. Bungaya	Rp.6.000.0000.000,-	Rp.5.703.543.600,-



3.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang melaksanakan.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, maka Dinas Pendidikan menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pendidikan Dasar, dengan indikator jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs);
2. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
3. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pendidikan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.1.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.1 Realisasi SPM Urusan Pendidikan

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	REALISASI SPM
I	PENDIDIKAN DASAR		
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	79.94%
II	PENDIDIKAN KESETARAAN		
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
III	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	73.41%

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 137.126.428.130,00.



4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pendidikan sebanyak 54 orang yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. **Permasalahan utama yang dihadapi yaitu :**
 - a. Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan disebabkan kondisi layanan pendidikan antar kecamatan belum berimbang.
 - b. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. **Solusi yang ditempuh yaitu :**
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang merata.
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 12 jenis pelayanan dengan 12 indikator utama :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
4. Pelayanan Kesehatan Balita, dengan indikator jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan indikator jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan indikator jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan indikator jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan indikator jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dengan indikator jumlah warga negara penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan;



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, dengan indikator jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB), dengan indikator jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*human immunodeficiency virus*), dengan indikator jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Kesehatan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.2.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.2 Realisasi SPM Urusan Kesehatan

	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92.65%
II	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93.40%
III	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94.79%
IV	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98.05%
V	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98.29%
VI	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	73.25%
VII	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		
7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93.50%



VIII	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	69.12%
IX	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		
9	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94.23%
X	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT		
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	79.08%
XI	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKOLOSIS (TB)		
11	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	77.39%
XII	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)		
12	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	77.45%

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 182.712.656.191,00.

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan sebanyak 900 orang yang terdiri dari pejabat struktural, tenaga medis/kesehatan serta pejabat fungsional umum.

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya pola hidup sehat.
- 2) Masih rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang cakupan makanan yang bergizi.
- 3) Masih tingginya angka kematian bayi.

2. Solusi yang ditempuh yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup sehat.
- 2) Peningkatan promosi dan preventif bagi masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi bagi usia dini.
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak.



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.3.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.3 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	100%
II	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	93.33%

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 4.113.701.000,-.

4.3.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 112 orang yang terdiri dari 29 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.



4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya pelayanan sanitasi bagi rumah tangga.
- 2) Belum tersedianya lahan untuk TPU.
- 3) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.
- 4) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengakses sanitasi.
- 2) Pengadaan lahan untuk TPU.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 4) Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.



4.4.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.4 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	95%
II	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	93.33%

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp. 20.649.000,-.

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebanyak 31 orang yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya kualitas rumah di Kabupaten Gowa.
- 2) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.
- 3) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah yang berkualitas dan terjangkau.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 3) Peningkatan akses kawasan permukiman melalui Program Kota Tanpa Kumuh.
- 4) Komitmen penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.



4.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator yaitu :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.5.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :



Tabel 4.5 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
II	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
III	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
IV	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
V	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	95.48%

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp. 34.513.346.119,-.

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebanyak 79 orang yang terdiri dari 48 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, 15 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran serta 16 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- 2) Sosialisasi Peraturan Daerah yang masih kurang ke pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
- 3) Masih terdapatnya bencana kebakaran yang tidak memenuhi *respon time* disebabkan karena lokasi yang jauh dari pos jaga pemadam kebakaran.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah.
- 2) Membentuk UPT Pemadam Kebakaran di beberapa kecamatan untuk memenuhi *respon time*.



4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dan 5 indikator, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Sosial menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.6.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.6 Realisasi SPM Urusan Sosial

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI		
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	88.27%
II	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI		
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	98.62%
III	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI		
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	91.99%
IV	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI		



4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
V	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 7.688.941.750,-.

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan sosial sebanyak 29 orang dengan 19 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum lainnya ditambah dengan 295 pekerja sosial professional/tenaga kerja sosial.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih relatif tingginya angka kemiskinan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan masalah sosial lainnya.
- 2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang bergerak pada penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan secara terpadu di berbagai sektor pembangunan.
- 2) Peningkatan minat dan kepedulian sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.118.716.382.121,00 dan terealisasi sebesar Rp.118.270.236.021,00 atau 99,62% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.520.508.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.000.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.249.800.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.870.331.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.870.225.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.389.123.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.551.495.000,- dan terealisasi sebesar Rp.441.426.000,- atau 80,04% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.697.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.861.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.620.320.000,- atau 98,13% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.774.100,- dan terealisasi sebesar Rp.39.091.100,- atau 49,00% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.220.294.021,- dan terealisasi sebesar Rp.95.166.045.921,85 atau 99,94% dari alokasi anggaran.

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.276.859.838,- dan terealisasi sebesar Rp.10.456.485.400,- atau 92,73% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.375.113.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.374.943.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.301.558.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.286.746.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.636.643.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.955.620.000,- atau 81,27% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.037.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.996.261.000,- atau 98,64% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.340.538,- dan terealisasi sebesar Rp.38.880.000,- atau 69,01% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.000.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.454.039.300,- dan terealisasi sebesar Rp.373.477.400,- atau 82,26% dari alokasi anggaran.

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.408.303.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.847.581.000,- atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.471.834.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.74.478.000,- atau 99,30% dari alokasi anggaran.



- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.815.219.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.262.619.000,- atau 93,73% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.650.000,- atau 83,57% dari alokasi anggaran.

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.421.425.875,- dan terealisasi sebesar Rp.302.315.399,- atau 71,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.723.600.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.080.200,- dan terealisasi sebesar Rp.136.934.624,- atau 97,75% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dan terealisasi sebesar Rp.3.497.338.293,- atau 65,87% dari alokasi anggaran.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2022**

a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.165.757.278.270,- dan terealisasi sebesar Rp.145.634.138.700,- atau 87,86% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.838.000,- dan terealisasi sebesar Rp.121.348.500,- atau 91,35% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.029.160.800,- dan terealisasi sebesar Rp.80.468.800,- atau 7,82% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.498.500,- dan terealisasi sebesar Rp.73.857.400,- atau 83,46% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.203.700,- dan terealisasi sebesar Rp.12.498.994,- atau 20,42% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.028.100,- dan terealisasi sebesar Rp.76.343.900,- atau 93,07% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.644.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.180.400,- atau 97,64% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.015.000,- yang terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.145.069.376,- dan terealisasi sebesar Rp.1.012.607.651,- atau 88,43% dari alokasi anggaran.



- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.105.689,- dan terealisasi sebesar Rp.47.862.500,- atau 68,27% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.229.875.046,- dan terealisasi sebesar Rp.222.056.808,- atau 96,60% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.529.150,- dan terealisasi sebesar Rp.65.544.000,- atau 91,63% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.835.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.615.000,- atau 96,17% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.994.514.565,- dan terealisasi sebesar Rp.2.288.836.085,- atau 76,43% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.547.575.918,- dan terealisasi sebesar Rp.121.224.118.817,- atau 88,78% dari alokasi anggaran.
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.350.829.126,- dan terealisasi sebesar Rp.2.260.409.529,- atau 96,15% dari alokasi anggaran.
- Operasional Pelayanan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.605.283.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.05.135.317,- atau 87,64% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.267.233.300,- dan terealisasi sebesar Rp.10.200.000,- atau 3,82% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.039.999,- atau 100% dari alokasi anggaran.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

• *Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2022*

a. *Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.389.679.290,- dan terealisasi sebesar Rp.9.025.638.885,- atau 86,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.982.305.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.728.000.240,- dan terealisasi sebesar Rp.6.414.891.835,- atau 83,01% dari alokasi anggaran.
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.679.373.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.628.441.300,- atau 96,97% dari alokasi anggaran.

b. *Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.584.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan



Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

- a. ***Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***

- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.002.000,- dan terealisasi sebesar Rp.145.835.000,- atau 72,92% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

- a. ***Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.028.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.958.979.000,- atau 99,14% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.673.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.608.730.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp.175.649.000,- atau 98,39% dari alokasi anggaran.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

- b. ***Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***

- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.962.100,- dan terealisasi sebesar Rp.54.291.100,- atau 93,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.035.400,- dan terealisasi sebesar Rp.38.385.400,- atau 91,32% dari alokasi anggaran.
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.926.700,- dan terealisasi sebesar Rp.15.905.700,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.

- c. ***Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***

- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.430.300.700,- dan terealisasi sebesar Rp.23.419.297.632,- atau 95,86% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

- d. ***Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***



Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.

e. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.790.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

f. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.581.227.680,- dan terealisasi sebesar Rp.1.556.099.920,- atau 98,41% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

• **Kegiatan dan Realisasi Tahun 2021**

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.286.895.940,- dan terealisasi sebesar Rp.251.765.230,- atau 87,75% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.316.250,- dan terealisasi sebesar Rp.103.908.000,- atau 99,61% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.118.750,- atau 92,43% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.211.000,- dan terealisasi sebesar Rp.89.018.480,- atau 77,94% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.200.000,- atau 83,62% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Layanan Kedaruratan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.833.690,- dan terealisasi sebesar Rp.11.020.000,- atau 74,29% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.500.000,- atau 83,33% dari alokasi anggaran.

b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.202.454.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.183.460.000,- atau 99,14% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.139.006.000,- atau 99,29% dari alokasi anggaran.



- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.062.454.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.044.454.000,- atau 99,13% dari alokasi anggaran.
- c. *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.282.950,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Makanan.



BAB V P E N U T U P

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah. Perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perkembangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada Pemerintah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2022 mencapai kinerja cukup memuaskan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran.

Atas capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gowa. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022 ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Dengan harapan laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang.